

POLITIK MASYARAKAT, NEGARA, DAN KESENIAN¹

Aprinus Salam
Jurusan Sastra Indonesia FIB UGM

1. Pengantar

Terdapat sejumlah implikasi yang berbeda, dan mungkin sedikit berseberangan, berkaitan dengan dua kecenderungan besar yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pertama, kekuatan daya atur dan formasi global yang mengkonstruksi masyarakat menjadi masyarakat jaringan (meminjam istilah Manuel Castells, 2001). Hal itu ditandai dengan kecenderungan pada sebagian masyarakat Indonesia untuk memilih menjadi bagian dari warga (jaringan) dunia. Paling tidak, pada tingkat kewacanaan, dalam sastra hal tersebut ditandai dengan novel-novel *Saman* (1999) karya Ayu Utami dan *Supernova* (2001) karya Dewi Lestari, dan beberapa yang lain. Beberapa novel dalam *chicklit* dan *teenlit* Indonesia, yang terkenal misalnya *Dealova* (2005), karya Dyan Nuranindya, kemudian novel ini juga difilmkan, para tokohnya hampir tidak pernah berpikir dalam posisi sebagai warga Indonesia. Beberapa tokoh dalam film *Cinta Silver* (2005) bahkan sudah menjadi bagian dari warga dunia. Dalam sinema Indonesia (sinetron), kehadiran anak-anak muda yang kaya yang “hanya” bermasalah dalam perebutan dan mendapatkan cinta dan penikmatan gaya hidup (global) bisa disaksikan bersama.

Kedua, daya tarik wacana kemandirian yang mengedepankan wacana-wacana lokal, dan secara politik adalah praktik desentralisasi yang bertumpu pada kemandirian daerah. Sebagian warga dikondisikan untuk melakukan aktivitas dengan basis lokalnya masing-masing. Dalam kesusastraan, isu dan wacana sastra lokal yang telah ramai dibicarakan pada tahun 1980-an, kembali mendapatkan legitimasinya. Novel Kuntowijoyo dalam *Mantra Penjinak Ular* (2000) dan *Wasripin dan Satinah* (2003), dan sejumlah novel Ahmad Tohari, antara lain *Belantik (Bekisar Merah 2)* (2001) dan *Orang-Orang Proyek* (2004), Gus TF Sakai dengan *Ular Keempat* (2005), dan sejumlah cerpen² yang ditulis oleh para cerpenis Indonesia, secara umum dapat

¹ Makalah pada Simposium Internasional dalam Rangka Dies Natalis ke-60 dan Lustrum ke-12 Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta, 16-17 Maret 2006.

² Lihat prosiding Kongres Cerpen Indonesia IV, *Ayo Estetika Lokal!*, , khususnya tulisan Maman S. Mahayana, “Perjalanan Estetika Lokal Cerpen Indonesia.” Pekanbaru, 26-30 November 2005.

dianggap mencoba mengangkat cerita-cerita dengan basis daerah atau lokalitasnya masing-masing. Tidak ketinggalan sinetron Indonesia, cerita-cerita silat dengan basis cerita masa lalu dan lokalitas tertentu, dan sinetron dakwah dengan *gugon tuhon* yang dipercaya oleh pemeluk daerah-daerah tertentu merupakan contoh yang terbentang di televisi kita.

Namun begitu, keduanya bergerak secara sporadis, tumpang tindih, walaupun dalam beberapa hal berjalan sendiri-sendiri, berupaya menemukan bentuknya yang paling signifikan. Keterangan di atas hanya ingin memberikan suatu pengertian bahwa setiap warga berhak dan memiliki kebebasan dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi dirinya, dan bersama-sama “bertujuan”, menjadi manusia-manusia dalam pilihannya masing-masing. Persoalannya adalah bagaimana menempatkan persoalan tersebut dalam konstelasi cara-cara kesenian ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kelembagaan bermasyarakat dan bernegara yang kondusif bagi proses-proses pembangunan yang mensejahterakan dan mengadilkan?

2. Politisasi Atas Nama dan Proses *Othering*

Pada tingkat keniscayaan, keduanya kecenderungan tersebut bergerak atas nama demokrasi dan kebebasan berekspresi. Implikasi pertama, dalam pengertian “negatif” berujung pada krisis identitas, atau dalam pengertian agak “positif” sebagai multi-identitas. Kepercayaan-kepercayaan pada batas-batas etnisitas, agama, ras, bahasa, gender, dan geo-politik, sebagai basis pembentukan identitas, juga rasa kebangsaan, mungkin mengabur, atau dimanfaatkan sekaligus. Pada umumnya, kecenderungan pertama terlihat pada masyarakat kota dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, kemudahan akses terhadap teknologi, dan sumber ekonomi yang beragam dan banyak.³ Bisa jadi mereka inilah yang disebut para elite, dalam berbagai tingkatannya. Tidak tertutup kemungkinan, walaupun mereka dalam banyak hal merupakan bagian dari masyarakat jaringan, masyarakat global, tetapi justru untuk kepentingan politik di tempatnya masing-masing, mereka memobilisasi wacana-wacana primordial atau lokal.

³ Istilah kota terutama memang dimaksudkan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, atau bahkan Yogyakarta. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk daerah-daerah juga memiliki kotanya sendiri, dan secara teknologis terhubung. Hal ini secara langsung berhubungan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan mengakses teknologi, sehingga banyak warga menjadi bagian dari masyarakat jaringan, walaupun ia berdomisili di kota kecil di sebuah pelosok di Indonesia.

Implikasi kedua, justru agak sebaliknya, yakni ketika batas-batas identifikasi dan identitas tersebut dipertegas, atau mengalami radikalisisasi. Berita-berita kekerasan dan konflik di daerah-daerah Indonesia, baik atas nama agama seperti di Poso, Maluku, dan lain-lain, (termasuk di dalamnya merebaknya formalisasi syariah Islam dalam perda-perda, seperti di Bulukumba, Nusatenggara Barat, beberapa daerah di Sumbar, Banjar, dan Aceh), etnisitas, golongan dan kelas, batas-batas daerah dan pemekaran (beberapa daerah di Papua, Sulawesi Selatan, NTB), atau bahkan atas nama demokrasi (apapun), dan sebagainya, dan di balik itu juga atas nama otonomi daerah, merupakan menu sehari-hari yang tampaknya belum akan berujung.

Sebagai resikonya, energi masyarakat banyak terkuras untuk hal-hal yang sangat politis (politisasi). Yang cukup berbahaya yang dapat diperhitungkan adalah bahwa apresiasi masyarakat dalam pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan, yang pada masa Orde Baru dimonopoli dan “dihegemoni” negara, berkembang menjadi virus-virus yang merusak persatuan dan kesadaran terhadap sesama orang Indonesia (nasionalisme Indonesia). Terdapat proses *othering* yang memisahkan kesamaan dan persamaan untuk menjadi Indonesia. Di Riau, misalnya, terdapat perlawanan dan upaya pembedaan dari penduduk asli Melayu terhadap dominasi Minang, Batak, dan Jawa. Di Bali, dengan wacana *ajeg* Bali, terdapat “permusuhan” dengan segala sesuatu yang di-“Jawa”-kan. Di satu tempat di Sumbar dan di Jabar, para PNS harus memakai jilbab bagi wanita jika bekerja. Di Bulukumba muncul perda-perda syariah, dan harus bisa mengaji jika ingin bertemu dengan Bupati, dan sebagainya. Yang tidak patuh, dianggap orang lain, bahkan mungkin musuh.

Hal utama yang ingin dikatakan adalah saat ini negara Indonesia sedang berada dalam satu situasi yang sama sekali tidak kondusif bagi bertumbuhnya *nation* keindonesiaan, rasa persaudaraan dan persamaan. Masyarakat Indonesia dikondisikan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, untuk berjaya-kaya sendiri-sendiri. Kondisi ini, seperti diketahui, merupakan proses panjang sejarah Indonesia. Setelah 1998, dan biasanya kita menyebut era reformasi, kondisinya tidak lebih menjanjikan. Hutang Indonesia menumpuk hingga lebih 1000 trilyun, kualitas SDM menurun menjadi peringkat 112 menurut *Human Index Report United Nations Development Programme* tahun 2003, pengangguran yang tercatat lebih dari 38 juta orang, teror bom, masyarakat melakukan penjarahan dan berkelahi di sejumlah tempat, kriminalitas

meningkat tajam, proses pemiskinan meroket, penegakkan hukum tersendat-sendat, dan sebagainya. Akan tetapi, di sisi lain yang lebih abstrak, sisi positif dari era beberapa tahun belakangan ini adalah bahwa gerakan dinamika masyarakat dianggap lebih pro-aktif dan mengalami penguatan.

Dalam situasi ketika masyarakat melakukan banyak keberanian dan percaya diri dengan caranya sendiri-sendiri sehingga terkesan anarkis, negara tampak tidak mampu melakukan sikap dan peran strategis untuk mengontrol “anarkisme” tersebut. Elite-elite negara sibuk mengurus konsolidasi dan penguatan kekuasaannya demi kekuasaannya itu sendiri, yang berakses langsung dengan konglomerasi modal-ekonomi, dengan mengorbankan pion-pion kecil (rakyat Indonesia). Sebaliknya, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam tekanan kemiskinan yang berimplikasi luas terhadap cara-cara mengatasi persoalan hidup. Akhirnya, seperti dapat kita rasakan bersama, ruang keteraturan dan kehidupan yang adil, sehat-sejahtera mengecil, ruang ketidakteraturan, kebiadaban, dan kemaksiatan membesar.

Ada beberapa hal yang menyebabkan negara tidak mampu memainkan peranan penting dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat. Pertama, negara (dan dalam hal ini khususnya pemerintah yang diberi mandat) berdiri dalam satu krisis sejarah politik pasca Orde Baru yang digugat, sehingga ada ketakutan-ketakutan dan ketidakpercayaan diri, agar tidak megulangi kesalahan yang sama. Konsep negara seperti yang diteorikan oleh Weber, yakni satu institusi yang berhasil memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik di suatu wilayah tertentu, dan menjadi praktik bernegara di Indonesia pada masa Orde baru telah mengalami berbagai perubahan.⁴

Memang, sejumlah tokoh kunci dan penting pada pemerintahan pasca Orde Baru masih merupakan bagian panjang dari tradisi politik yang diwariskan oleh pemerintahan Orde Baru. Namun, pemerintahan yang baru di Indonesia mengalami kegagalan dalam memilih cara dan gaya memerintah sehingga karena kegagalan tersebut otoritas, kapasitas, dan kompetensi negara menjadi sangat berkurang. Akibatnya, masyarakat tidak taat dan takut kepada negara, segala aturan yang dibangun

⁴ Bandingkan dengan keterangan Arief Budiman, 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.

oleh negara cenderung dilawan. Perlawanan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, perlawanan terhadap perda-perda, yang didemonstrasi oleh berbagai kalangan dan menimbulkan kerusuhan adalah beberapa contoh yang dapat dikemukakan.

Kedua, tarik ulur dan kompromi-kompromi politik menyebabkan pemerintah yang diberi mandat tidak mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tegas dan berwibawa, atau kebijakan yang diambil tidak begitu berpengaruh pada tingkat operasional. Pemerintah yang diberi mandat dikondisikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan insidental dan darurat, sehingga tidak terbantu untuk berpikir panjang dalam membangun negara yang kuat. Di samping itu, rendahnya integritas dan kualitas SDM yang berposisi sebagai aparatus negara, seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan, aparat pendidikan, ataupun instrumen politik lainnya, merupakan masalah krusial yang hingga hari ini masih menjadi salah satu problem utama negeri ini.

Ketiga, negara juga tidak memainkan peranan penting dalam membangun imajinasi ruang ketiga, mengikuti perspektif Bhaba (1994), yakni negara sama sekali hampir tidak mendukung program-program pengembangan wacana dalam membangun imajinasi berbangsa dan bernegara yang seharusnya dapat dimainkan oleh, misalnya, film, sinema, sastra, atau bahkan teater. Dunia seni hanya untuk bisnis merupakan contoh yang dapat dikaji lebih jauh.

Problem besar lain, yang tidak sepenuhnya menjadi masalah lemahnya peran negara, yakni buruknya sistem rekrutmen kepegawaian, tidak jelasnya visi dan misi pendidikan nasional yang tampak pada kurikulum dan muatan materi pelajaran, serta banyak aspek lain yang menyebabkan Indonesia terperosok jauh menjadi bangsa yang lemah, carut marut, dan masalah-masalah yang menimpa terus menerus bergantian. Perubahan yang cepat dalam konsolidasi, sistematisasi, dan transformasi politik memperparah kualitas kehidupan politik Indonesia. Kita tahu, di sejumlah tempat di Indonesia, yang menjadi tokoh legislatif dan eksekutif adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dan tradisi politik dan intelektual apa pun, ada yang mantan preman, atau mereka yang tidak jelas apakah pernah mengenyam bangku sekolahan tingkat Sekolah Menengah Atas atau tidak. Akan tetapi, tentu saja mereka berhak menjadi apapun yang mereka inginkan.

Terdapat persoalan, apakah jika negara memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat, negara akan terjebak kembali

menjadi negara otoriter. Seperti akan disinggung kemudian, kemampuan yang tinggi yang dimiliki negara dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat bukan dalam rangka membangun kekuasaan negara demi segelintir aparatur penguasa, tetapi pemilikan kekuatan yang memaksa demi terjaganya keamanan, kesejahteraan, tegaknya hukum, keadilan sosial dan ekonomi, dan demokrasi.⁵

Dalam kondisi itu, kita dihadapkan dalam dua hal, yakni mempertimbangkan dua pilihan yang mungkin tidak begitu membuat nyaman. Pertama, apakah negara diberi mandat sepenuhnya untuk melakukan pemaksaan demi tegaknya keadilan dan demokrasi, dengan resiko negara menjadi kuat, atau, kedua, justru membiarkan masyarakat bersaing di dalam dirinya sendiri untuk mencoba segala cara, atas nama keadilan dan demokrasi, tetapi yang terjadi adalah anarki. Berjangkitnya kelompok-kelompok yang menginginkan berkurangnya “kemaksiatan sosial”, misalnya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan, adalah contoh-contoh yang dapat dikedepankan.

Ada ketakutan lain, jangan-jangan jika negara diberi wewenang untuk memiliki kemampuan yang kuat dalam menegakkan keteraturan, ketertiban, dan kedisiplinan, akan *kebablasan*, dan seberapa jauh masyarakat akan memiliki kekuatan dalam mengontrol hal itu? Seberapa jauh dan mendesak Indonesia memerlukan negara yang kuat? Amerika, Jerman, Perancis, dan beberapa negara lain adalah contoh negara yang kuat dan dengan kehidupan demokratis yang cukup terpelihara. Artinya, ketakutan terhadap negara yang kuat akan mematikan demokrasi sangat mungkin merupakan ketakutan yang tidak terlalu beralasan. Akan tetapi, tentu saja trauma sejarah dan beberapa kondisi budaya dalam masyarakat Indonesia terhadap ketakutan negara yang kuat memang merupakan alasan yang harus dipertimbangkan.

Berangkat dari kenyataan di atas, saat ini dapat dipaparkan konstelasi dikotomis dalam masyarakat Indonesia. Pertama, terjadinya oposisi antara tuntutan untuk menjadi warga (jaringan) dunia berhadapan dengan kehendak untuk tetap merupakan bagian dari identitas warga nasional Indonesia. Dalam praktiknya, bentuk oposisi ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Paling tidak, secara ideologis tidak berdampak pada konflik-konflik yang berhadapan secara langsung. Persoalan yang muncul lebih pada tingkat

⁵ Lihat dan bandingkan juga dengan tesis Francis Fukuyama, 2005. *Memperkuat Negera: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia.

wacana, di samping arena permainan oposisi ini relatif sangat besar sehingga resiko untuk berhadapan (fisik) secara langsung juga sangat kecil.

Kedua, terjadinya oposisi antara tuntutan untuk tetap mempertahankan identitas Indonesia dengan basis nasion keindonesiaan berhadapan dengan tuntutan identitas keindonesiaan dengan basis lokal-lokal, termasuk di dalamnya basis agama, geografi (kewilayahan), bahasa, suku, atau bahkan isu-isu ras. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa ruang permainan oposisi ini bisa sangat menyempit dan menimbulkan pertentangan-pertentangan yang bersifat langsung. Tampaknya, berbagai kasus dan ketegangan yang sedang terjadi saat ini lebih didominasi oleh permainan oposisi ini. Kasus kartun Nabi Muhammad, areal oposisifnya secara kewilayahan memang terkesan besar, tetapi ruang wacana yang dipolitisasi justru diperkecil (primordial) sehingga benturan fisik tampaknya tidak dapat dihindari.

Sebagainya akibatnya, karena proses-proses ideologisasi dalam kelompok-kelompok masyarakat, atas nama demokrasi dan identitas apapun, masyarakat Indonesia (tentu tidak hanya di Indonesia) semakin sulit memahami perbedaan, merasa paling benar dan paling berhak atas kehidupannya sendiri. Negara seolah tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan apapun yang secara signifikan ikut menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara-cara yang demokratis, berkeadilan, dan secara kondusif dapat diterima oleh berbagai kalangan yang saling berhadapan.

4. Memanfaatkan Ruang Ke-Tiga

Memang, terdapat gejala lain yang berdiri di antara kedua kecenderungan tersebut. Dengan keterbatasan dalam mengeksplorasi dan menghadirkan data-data sejarah, film *Gie* (2005) merupakan contoh yang cukup baik bagaimana sejarah dan praktik politik di Indonesia dipersoalkan, bagaimana politik seketarian (terutama aktivitas politik di kampus) agak ditertawakan. Di samping itu, walaupun masih bersifat “reaksionis”, beberapa lagu Dewa, misalnya “Laskar Cinta” (*Republik Cinta*, 2005), lagu yang cukup digemari masyarakat Indonesia, merupakan contoh pewacanaan dalam cara-cara kesenian untuk memobilisasi rasa cinta.//*Laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa merusak jiwa dan busukkan hati, laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia!//*. Kelebihan lagu dewa ini adalah

pesan verbal untuk saling mencintai, mengasihi sesama manusia, walau pesan yang coba dikedepankan berasal dari sumber-sumber Islam, tetapi pesan tersebut dikemas secara profan dengan substansi yang agnostik.

Niat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata membuat film mengenai kekayaan budaya lokal dari tiap propinsi, yang akan dikemas dalam paket berisi 33 *video compact disc*, tentu perlu disambut dengan baik.⁶ Paket VCD itu akan dibagikan ke sekolah, terutama SD agar bisa ditayangkan saat pelajaran berlangsung. Masalahnya, kalau pembuatan film tersebut tidak dikemas dalam cara-cara berkesenian yang canggih, tidak tertutup kemungkinan yang terjadi adalah ajang verbalisasi dan “dakwah” yang tidak menyentuh hati masyarakat. Jika itu yang terjadi, hal itu sebetulnya hanya akan mengulangi buku pelajaran lain yang hingga hari ini masih dibaca oleh para pelajar kita. Sebagai misal, berikut dikutipkan salah satu teks IPS untuk siswa SD.

Seperti kalian ketahui bahwa wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan beraneka ragam kebudayaannya. Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berpotensi terjadinya perpecahan. Lebih berbahaya lagi kalau ada wilayah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu tidak boleh terjadi, NKRI merupakan pilihan terakhir bagi bangsa Indonesia. Untuk menjaga keutuhan negara kita maka kita harus bersatu. Persatuan patut diutamakan walaupun kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan budayang yang berbeda. Keragaman suku bangsa merupakan modal utama dalam mempertahankan negara dan bangsa Indonesia.⁷

Paragraf di atas merupakan contoh yang baik bagaimana ideologi negara otoriter telah melumpuhkan penalaran paragraf tersebut. Paragraf tersebut dibuka dengan kalimat; *Seperti kalian ketahui bahwa wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan beraneka ragam kebudayaannya*. Jadi, ide utamanya adalah adanya berbagai suku bangsa dan beraneka ragam kebudayaan. Akan tetapi, ide itu tidak diikuti oleh penjelasan di mana letak keragamannya. Justru keragaman itu bisa menimbulkan perpecahan. Kalimat tersebut jelas nalar dalam kepentingan negara, bukan tulisan yang dapat mengembangkan paragraf berpikir kritis dan memahami sesuatu. *Lebih berbahaya lagi kalau ada wilayah yang ingin memisahkan diri dari*

⁶ *Kompas*, Kamis 23 Februari 2006. hlm. 12.

⁷ Tim Bina Guru, 2002. *Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SD Kelas IV*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 3. Paragraf senada dapat ditemukan dalam Nanang Cahyadi, 2004. *Pengetahuan Sosial 4 untuk Sekolah Dasar Kelas 4*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 2.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penjelasan kalimat ini jelas pembodohan. Apa hubungan antara keragaman (yang tidak dijelaskan itu) sehingga menimbulkan konflik. Kalau kenyataannya saat ini banyak konflik dan ada wilayah-wilayah yang ingin memisahkan dari NKRI, itu bukan karena adanya keragaman, tetapi buruknya negara mengelola keragaman itu. Kita tidak pernah paham bagaimana mengelola perbedaan dari berbagai keragaman yang ada. Tanpa pengetahuan dan penghormatan terhadap keragaman, yang harus kita lakukan adalah bersatu dalam keragaman itu sendiri, tentu merupakan sesuatu yang sulit untuk dipraktikkan.⁸

Dengan demikian, diperlukan adanya ruang ketiga, ruang antara, atau dalam bahasa Bhabha (1994: 3-4) ruang *liminality, in between, third space*, yakni ruang perjumpaan perbedaan-perbedaan kultural dan sekaligus ruang perjumpaan identitas tempat terjadinya gerak interaktif terus menerus antara status-status yang berbeda, yaitu “mereka yang merasa dieksklusi”, dengan mereka yang dituduh “mengeksklusi”. Apalagi mengingat bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, etnis, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan dalam arti yang luas. Negara selayaknya ikut membantu mengenyahkan, lewat ruang ketiga tersebut, keinginan untuk mendominasi orang lain, kelompok masyarakat tertentu lewat politik identitas, memanipulasi simbol-simbol agama, menciptakan kesadaran-kesadaran palsu, melalui dan/atau atas nama politik atas nama apapun.

Itulah sebabnya, negara selayaknya kembali memainkan peranan penting dalam membangun ruang imajinasi agar perbedaan dan keragaman justru merupakan rahmat yang harus disyukuri bersama. Ruang itu “secara cerdas” pernah dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru, terutama aparatus militernya, dengan pembuatan film *Pengkhiantanan G 30 S/PKI* (1984), atau juga seperti tampak pada film-film *Enam Djam di Jogja*, *Janur Kuning*, dan *Serangan Fajar* seperti pernah dibicarakan Budi Irawanto (1999). Akan tetapi, tentu saja bukan film-film seperti itu yang dimaksudkan. Bukan saja film-film tersebut tersebut bermasalah bagi tumbuhnya kesadaran terhadap kebanggaan Indonesia, melainkan sangat mungkin justru menimbulkan “rasa beci” terhadap sejarah Indonesia itu sendiri.

Seperti telah disinggung, pada akhirnya masyarakat mengambil inisiatif sendiri-sendiri. Ini juga menjadi salah satu ciri yang menarik ketika era reformasi ditandai

⁸ Lihat juga kajian menarik dari Niels Mulder, 2003. *Wacana Publik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

berbagai upaya untuk “memperbaiki segala hal yang tidak beres dari Orde Baru”. Setiap orang atau kelompok masyarakat berpeluang bebas untuk melakukan banyak hal, tanpa ada rasa sungkan. Konsentrasi perbaikan tersebut tampaknya terjadi dalam dunia politik. Banyak orang, dengan segala macam cara mengharu-biru dunia politik Indonesia. Dalam dunia seni, khususnya sinetron dakwah seperti banyak ditayangkan di televisi, politik masyarakat dalam berkesenian adalah dengan melakukan terapi-terapi internal di dalam dirinya, yakni dengan upaya “menakut-nakuti”, bahwa jika kemaksiatan tersebut terus dilakukan, Anda pasti akan masuk neraka. Terapi penakutan tersebut, misalnya, adalah dengan menghukum secara langsung berbagai kejahatan yang dilakukan, bukan saja ancaman terhadap hukuman di akhirat, tetapi juga di dunia. Sebagai resikonya, dunia kesenian justru banyak diperankan oleh para “petualang”, baik bisnis maupun politik karena tampaknya hal itulah sekarang yang sedang laku di pasaran. Seniman-seniman bahkan ikut bernyanyi dalam permaian besar tersebut.

Persoalannya adalah bahwa kesenian kadang terjebak pula dalam verbalisasi yang tidak menjelaskan apa-apa sehingga tidak memiliki kemampuan yang tinggi menyentuh kesadaran masyarakat. Hal itu terjadi mengingat verbalisasi dakwah yang bertumpuk-tumpuk itu mengalami kesulitan menembus lorong-lorong kesadaran manusia yang juga telah lelah menghadapi berbagai problem kehidupan. Sebagai misal, sinetron kita bukan cerita yang menyentuh rasa dan kesadaran dalam diri masyarakat, tetapi hanya berupa ceramah yang dibungkus oleh cerita. Sebutlah beberapa sinetron dakwah seperti *Rahasia Ilahi*, *Doa Membawa Berkah*, *Titipan Ilahi*, *Azab Tuhan*, *Azab Dunia*, *Anakku Bukan Anakku*, *Hanya Tuhan yang Tahu*, *Tuhan Ada di Mana-mana*, *Takdir Ilahi*, *Suratan Takdir*, *Kafir*, *Di Balik Kuasa Tuhan*, *Taubat*, *Azab Ilahi*, *Sakratul Maut*, *Istigfar*, dan sebagainya. Negara tentu senang-senang saja melihat fenomena tersebut karena dari cerita sinetron yang berjubal itu di dalamnya ada upaya untuk membentuk manusia religius yang saleh dan bertaqwa. Negara jelas membutuhkan masyarakat yang religius dan saleh. Masalahnya hingga hari ini tidak pernah ada bukti yang signifikan bahwa sinetron yang menakut-nakuti itu menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk berbuat kemaksiatan. Pertama, mungkin yang menonton adalah mereka yang “memang orang baik-baik saja”, atau, kedua, yang berbuat jahat tidak pernah tertarik atau tidak pernah sempat menonton sinetron.

Disamping itu, kesenian menjadi bermasalah karena kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami dan mengapresiasi peristiwa kesenian. Tidak jarang kesenian justru menjadi ajang tersendiri dalam menimbulkan konflik-konflik yang menimbulkan ancaman kekerasan. Kasus logo VCD Band Dewa Album *Laskar Cinta* (2005) mendapat gugatan yang ramai dari kelompok-kelompok Islam tertentu. Seolah seni dan Islam yang benar adalah seperti yang disuarakan oleh kelompok Islam tertentu tersebut. Dalam kejadian itu, mengherankan, negara (pemerintah yang diberi mandat) dengan aparatusnya, misal Majelis Ulama Islam (MUI) tidak mengambil peranan strategis dalam menjelaskan kemungkinan adanya interpretasi yang berbeda.

Sebagai akibatnya, dalam rentang waktu yang cukup panjang, hingga hari ini kita belum memiliki satu produksi dan hasil kesenian, dalam pengertian luas, yang memberi wacana imajinatif terhadap proses-proses yang membanggakan menjadi warga Indonesia. Suatu hasil kesenian, yang mendapat dukungan sepenuhnya dari negara, yang memberi pelajaran dan penghormatan terhadap kemajemukan dan keunikan, di dan dalam proses penegakan demokrasi, hukum, dan keadilan berbangsa. Seniman-seniman film Amerika dan Inggris, misalnya, memang mengambil inisiatif-inisiatif sendiri dalam membuat film. Akan tetapi, negara secara kondusif mendukung sepenuhnya untuk terlibat jika diperlukan, termasuk menggunakan segala alat, dokumen, untuk keperluan pembuatan film. Tidak ada ketakutan mengkritik presiden atau Ratu Inggris jika yang diperjuangkan adalah nilai-nilai manusia, keunggulan bangsa Amerika atau Inggris, seperti kejujuran, sportivitas, dan sikap bertanggungjawab atas kemanusiaannya.

Seniman Amerika, hingga kini masih merasa perlu untuk memelihara kebanggaan itu terus menerus, dengan membuat film-film yang selalu memompa semangat untuk menjadi bangsa Amerika. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an awal, film *Missing in Action* yang dibintangi aktor terkenal Chuck Norris, atau *Rambo*, yang dibintangi Sylvester Stallone, membuat orang Amerika selalu heroik dengan kepahlawanannya. Belakangan, di akhir 1990-an dan di awal tahun 2000-an, film *Postman*, *Gods and Generals*, dan *Cold Mountain* adalah segelintir film yang membuat bangga menjadi orang Amerika. Dalam adegan terakhir film *The Postman* yang dibintangi Kevin Costner, sang tokoh, si pengantar surat, dalam ancaman maut, pisau

tajam sedang menghujam di wajah, digertak oleh antagonisnya. “Kau ingin menjadi jagoan, kau ingin menjadi pahlawan, kau percaya pada Tuhan.” Jawaban sang tokoh, “Tidak, saya tidak percaya pada itu. Saya hanya percaya pada kesatuan bangsa Amerika.” Kita tahu, orang Amerika begitu bergembira dengan keamerikaannya. Film-film Amerika itu tidak sedang membanggakan peran militer atau bahkan pengantar surat yang terlupakan, tetapi memperjuangkan keluhuran moral, memperjuangkan kemanusiaan.

Kemudian, banyak orang bertanya, apa perlunya nasionalisme (keindonesiaan)? Teman saya Mikihiro Moriyama, yang menulis disertasi tentang Sastra Sunda bertanya, “Apa perlu nasionalisme, kami orang Jepang merasa tidak perlu,” katanya. Saya jawab, “Untuk orang Jepang mungkin tidak perlu. Ada dan tidak ada nasionalisme Jepang, orang Jepang hidup dalam perekonomian yang baik, berbagai peraturan dan hukum relatif jalan. Pembangunan dapat berjalan dengan damai dan sukses. Dan yang pasti, orang Jepang bangga dengan kejepangannya. Saya ragu, apakah orang Indonesia bangga dengan keindonesiaannya. Paling tidak Taufik Ismail sudah berpuisi dengan kemaluannya menjadi orang Indonesia. Saya cuma bisa berharap, mana tahu dengan munculnya kembali rasa persaudaraan dan senasib sepenanggungan sesama orang Indonesia, konflik dan kerusuhan bisa ditekan. Mana tahu, dengan kembalinya bersama-sama semangat dan bangga menjadi bangsa Indonesia, kami kembali bisa bersama-sama membangun negeri Indonesia dengan penuh gairah.”

Daftar Pustaka

A. Novel

- Dee (Dewi Lestari). 2001. *Supernova*. Bandung: Truedee Books.
 Kuntowijoyo. 2000. *Mantara Penjinak Ular*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
 Kuntowijoyo. 2003. *Wasripin dan Satinah*. Jakarta: Kompas.
 Nuranindya, Dyan. 2005. *Dealova*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
 Sakai, Gus TF. 2005. *Ular Keempat*. Jakarta: Kompas.
 Tohari, Ahmad. 2001. *Belantik*. Jakarta: Gramedia.
 Tohari, Ahmad. 2004. *Orang-Orang Proyek*. Yogyakarta: Mahatari.
 Utami, Ayu. 1999. *Saman*. Jakarta: Gramedia.

B. Referensi

- Babha, Homi K. 1994. *The Location of Culture*. London and New York: Routledge.
 Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.

- Cahyadi, Nanang. 2004. *Pengetahuan Sosial 4 untuk Sekolah Dasar Kelas 4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Castells, Manuel. 2001. *The Rise of The Network Society*. Oxford: Balckwell.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawanto, Budi. 1999. *Film, Ideologi, dan Militer Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Kompas*. 23 Februari 2006.
- Mahayana, Maman S. 2005. "Perjalanan Estetika Lokal Cerpen Indonesia," dalam Prosiding Kongres Cerpen Indonesia IV, 2005. *Ayo Estetika Lokal!*, Pekanbaru, 26-30 November.
- Mulder, Niels. 2003. *Wacana Publik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Bina Guru. 2002. *Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SD Kelas IV*. Jakarta: Erlangga.

C. Film/VCD:

Pengkhianatan G 30 S/PKI (1984), *The Postman* (1997), *Cold Mountain* (2003), *Dealova* (2005), *Cinta Silver* (2005), *Gie* (2005), dan *Republik Cinta* (Dewa, 2005).